

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Amal, Bakhrul, *Pengantar Hukum Tanah Nasional Sejarah, Politik, dan Perkembangannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.
- Goenawan, Kian, *Panduan Mengurus Izin Tanah & Properti*, Pustaka Grhatama, Yogyakarta, 2008.
- Harsono, Boedi, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti Press, Jakarta, 2002.
- _____, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2020
- Parlindungan, A.P., *Tanya Jawab Hukum Agraria dan Pertanahan*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Sumarja, FX, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Universitas Lampung Press, Lampung, 2010.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Lembaran Negara Tahun 1960, Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Lembaran Negara Tahun 1996, Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 59. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. Lembaran Negara Tahun 2015, Nomor 351. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 569. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1693. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Bertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 319, Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 501. Jakarta.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010, Nomor 19. Ngawi

Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019. Jakarta.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15.1/IV/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01/JUKNIS-400.HR.01/III/2019 Tentang Petunjuk Teknis Bidang Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PH.02/499-400/IV/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Dalam Skema Akses Mengikuti Aset (Pemberdayaan Masyarakat Pasca Legalisasi Aset) atau Dalam Skema Aset Mengikuti Akses Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Surat Edaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/SE-100.TU.03/III/2020 Tentang Pelayanan Pertanahan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus 2019.

Surat Edaran Nomor 2/SE-100.TU.03/III/2020 Tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

3. LAIN-LAIN

Wawancara dengan Bapak Eko Prasetyo, S.ST., M.T., Kepala Seksi Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (pada hari senin, tanggal 28 September 2020, pukul 13.40)

Wawancara dengan Bapak Murtoyo selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi pada 15 Februari 2021, pukul 12.00

Wawancara dengan Bapak Agus Joko W., Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Tanah dan Pembinaan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 11.39

Wawancara dengan Bapak Kasto, Sekretaris Desa Jururejo Kecamatan Ngawi, pada tanggal 16 Maret 2021, pukul 18.50

Atmadja, Dewa Gede. 2018. *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*. Kertha Wicaksana. 12(2).

Hisbullah, Rakhmat Wiwin, dkk. 2018. Asas Publisitas pada Pelaksanaan Program Nasional Agraria Dalam Rangka Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Publik. *Madani Legal Review*. 2(1).

Kurniawati, Aisyah Silvi. 2020. *Asas Akuntabilitas dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018*. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 26(2).

Puspita, Denik. 2019. *Problematika Penerapan Asas Terjangkau dalam Pendaftaran Tanah*. *Pena Justisia*. 18(2).

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, “*Jadi Percontohan, Kementerian ATR/BPN Luncurkan Program Tri Juang Pemetaan Pertanahan*”, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/jadi-percontohan-kementerian-atr-bpb-luncurkan-program-tri-juang-pemetaan-pertanahan> (diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pukul 05.30)

Halodoc, “*Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia*”, <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia> (diakses pada 16 Maret 2021, pukul 17.01)

KBBI Daring, “*Terjangkau*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terjangkau> (diakses pada 10 November 2020, pukul 16.10)

Online Pajak, “*Ketahui Tarif BPHTB & Cara Mudah Menghitungnya di Sini!*”, www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/tarifbphtb#:~:text=BPHTB%20sendiri%20merupakan%20pungutan%20atas,tanggung%20jawab%20untuk%20membayar%20pajak (diakses pada 19 Februari 2021, pukul 21.02)

Redaksi WE Online, “*Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Dunia*”, <https://www.wartaekonomi.co.id/read309848/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-perekonomian-dunia-infografis> (diakses pada 30 Desember 2020, pukul 10.10)

Tempo, “*Pandemi Corona, Anggaran Kementerian ATR/BPN Dipangkas 2T*”, <https://bisnis.tempo.co/read/1332747/pandemi-corona-anggaran-kementerian-atrbpn-dipangkas-rp-2-t>, (diakses pada 16 Maret 2021, pukul 20.09)

Materi Paparan Kepala Kantor Pertanahan 2019 pada Monitoring, Evaluasi, dan Proyeksi Pencapaian Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi 2019